



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR188.4/216 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. bahwa agar pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum resmi Pemerintah Daerah yang melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan saran dan masukan guna penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Pencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026) (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. mempersiapkan hal-hal teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan Musrenbang;
2. memberitahukan pelaksanaan Musrenbang kepada Perangkat Daerah teknis dan stake holder lainnya;
3. mengorganisasi dan melakukan rekapitulasi usulan-usulan Musrenbang Distrik yang disampaikan pada Musrenbang Kabupaten; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbang kepada Penjabat Bupati Jayapura Cq. Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 17 Februari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/216 TAHUN 2023
TANGGAL 17 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pelindung	3.000.000
2.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd. MKP	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	2.800.000
3.	ELPHYNA SITUMORANG, AP, S.Sos, MKP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Pengarah Bidang Pemerintahan	2.600.000
4.	Dra. DELILA GIAY, M.Si	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Pengarah Bidang Ekonomi	2.600.000
5.	Ir. JOHN WICKLIF TEGAY, MM	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Pengarah Bidang Fisik dan Prasarana	2.600.000
6.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	2.500.000
7.	VICTOR SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	2.300.000
8.	SUBHAN, SE, MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
9.	MEYER MIANTO C. SUEBU, SE.M.Si	Inspektur	Anggota	2.200.000
10.	LUKMAN ENRICO, ST, MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	Anggota	2.200.000
11.	JHON MANGGO, S.IP	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000

1	2	3	4	5
12.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
13.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
14.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
15.	ARNOLD AKOBIAREK SH., MH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	2.200.000
16.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
17.	SELVIA AMBALANGI, SE, MM	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
18.	MELKYANUS E. YEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
19.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisis dan Penilaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
20.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
21.	MELKIAS WOKMAN, S.Pi	Kepala Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
22.	MARTHA Ch. YUFUAY, S.Hut	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Perhubungan dan Komunikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000

1	2	3	4	5
23.	ERWIN, ST	Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan, Pemukiman, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
24.	KOSMUS KAAY, S.Th	Kepala Sb Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
25.	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
26.	ELISABETH KARMA, S.Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
27.	YUSUF MOSES WORUMI, ST	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
28.	METTY I. T. PALINTIN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
29.	BELINDA E. PIGOME, S.Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
30.	MASNI, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
31.	HAFSAH DIYALI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
32.	RUDI RUMAYOMI, S.IP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
33.	SISILIA D. SAPRANIM, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000

1	2	3	4	5
34.	PATRISYA NAPO, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
35.	KRISTA IMELDA APASERAY	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
36.	MARTHA KOSSI, SH	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
37.	YOHANIS KRISTIAN MONIM	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
38.	HANNA HAMADI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
39.	KOITAVINA KURNIA JATUSARI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
40.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
41.	IERMA SANGEAN BAUW	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
42.	OBETH GIBSON IMBIRI, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
43.	FRITS MIAMIN EYBE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
44.	VIKTOR ENONI ZAI, S.Kom	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
45.	DICKY A. S. SAHERTIAN, S.Kom	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
46.	FREDIKA KAMBUAYA	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
47.	FABLO PARDOMUAN SILALAH	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000

1	2	3	4	5
48.	ARIF BUDIMAN, ST., MM	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
49.	CHEVIN O. HIKOYABI, S.IP	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
50.	REGINA KOSTANSI K. MAHUSE	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
51.	TINEKE ALBERTINA OKOKA	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
52.	NURDIANA AMITA PUTRI	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
53.	ABRIAWAN	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
54.	ADOLOF	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
55.	JHON RUMERE	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
56.	HILLERI FITLE	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
57.	TAUFIK AMIR, ST	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
58.	FIDEL A.N. PEPUHO	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
59.	DANIEL W. F. RUMBOBIAR	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
60.	MARIA WALLY, B.IT	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
61.	YOHOSUA ISAK ORMUSERAY	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
62.	MICHAEL KARAFIR	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
63.	BUDI HANDOKO	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000
64.	LIVIA HIKOYABI, S.Kep	Staf Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.200.000

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KERALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003